

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

COVID-19 pertama kali merebak di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 (Li dkk., 2020; Riou & Althaus, 2020). Meskipun Pemerintah baru mengumumkan kasus pertama di Indonesia pada awal Maret 2020, banyak pihak percaya bahwa COVID-19 sudah jauh lebih dulu menjangkiti masyarakat Indonesia (Almuttaqi, 2020; Pranita, 2020; Massola, 2020). Setelah pengumuman resmi tersebut, pemerintah mengimbau untuk taat kepada berbagai kebijakan, seperti Mencuci Tangan, menggunakan masker, melakukan *social distancing* (sd) yang diartikan sebagai pembatasan diri untuk keluar rumah, menghindari kerumunan, menjaga jarak fisik serta kebijakan terbaru yaitu pelaksanaan PPKM di beberapa wilayah di Indonesia (Djalante dkk., 2020; Setiati & Azwar, 2020).

Sehubungan dengan itu, Presiden RI, Joko Widodo, telah menyampaikan penjelasan resmi terkait perkembangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Selasa (20/7). Presiden mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak *over capacity*. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM sampai 25 Juli 2021. Namun terus memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak PPKM. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021, Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. (Siaran Pers Nomor. HM.4.6/187/SET. M.EKON.3/07/2021)

Lebih lanjut, melaksanakan kebijakan perpanjangan PPKM membuat pemerintah menerbitkan dua Instruksi Mendagri, yaitu Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak 21 s.d. 25 Juli 2021. (Siaran Pers Nomor HM. 4.6/187/SET.M.EKON.3/07/2021).

Namun, di lain sisi, penerapan kebijakan tersebut dalam upaya menekan angka persebaran Covid-19 tidak disertai dengan ancaman hukuman atau penertiban menyeluruh oleh aparat yang berwenang (Subarkah, 2020; Davina, 2020). Karena itu, implementasinya bisa dikatakan longgar di lapangan sehingga menggantungkan diri pada kesadaran masyarakat sendiri. Dalam skala lokal, di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), angka penyebaran Covid-19 meningkat. Protokol yang diterapkan dalam skala nasional pun diterapkan di level lokal. Tercatat dari 51 kelurahan di Kota Kupang, hanya dua kelurahan yang masih masuk kategori zona hijau, yaitu Kelurahan Tode Kiser, Kecamatan Kota Lama dan Mantasi, Kecamatan Alak. Sementara 12 Kelurahan masuk zona kuning atau jumlah kasus aktif satu hingga lima kasus. 10 Kelurahan masuk zona *orange* atau jumlah kasus aktif mencapai enam hingga 10 kasus. Sementara 27 kelurahan masuk kategori zona merah salah satunya Kelurahan Oetete dengan jumlah kasus aktif di atas 10 kasus. Pasien yang masih dirawat sebanyak 654 orang. Dirawat di rumah sakit 75 orang dan yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 579 orang. Sesuai dengan data tersebut, dalam sepekan terakhir kasus terkonfirmasi covid-19 di Kota Kupang naik 391 kasus (Merdeka News.com).

Oleh sebab itu, pemerintah sudah bersiap untuk melakukan perubahan terhadap surat edaran Wali Kota Kupang terkait dengan penerapan PPKM mikro, yang dikeluarkan pada tanggal 22 juni sampai tanggal 5 Juli 2021. Hal-hal yang akan dipertegas yaitu membatalkan dan menghentikan semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, baik itu pesta,

syukuran dan lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi pada persepsi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan terkait Covid-19 yang diterapkan pemerintah. Artinya, walaupun kebijakan bertujuan untuk menekan angka covid-19 akibat dinamika penyebarannya yang selalu naik turun--tetapi bisa ditanggapi secara lain oleh masyarakat yang terkena imbasnya. Masyarakat yang berdagang misalnya, sangat terkena imbasnya akibat pelanggan yang berkurang. Karena itu ketakutan akan ancaman Covid berbanding lurus dengan mendesaknya kebutuhan ekonomi para pedagang. Dengan kata lain, kebijakan berganti dari satu ke satu, sehingga masyarakat pun mempertanyakan tentang kejelasan kebijakan pemerintah. Hal ini didukung lagi dengan tidak adil/meratanya kebijakan pemerintah yang tegas di satu pihak, dan lunak untuk pihak-pihak tertentu. Masalah seperti ini yang kemudian membuat peneliti berpikir untuk mengkaji masalah ini secara detail dengan berfokus kepada persepsi masyarakat yang selalu menjadi sasaran dari kebijakan pemerintah.

Karena itu, penelitian ini akan didesain dengan beberapa konsep kunci, yakni: pertama, Covid-19, sebagai suatu keadaan yang mana sudah tidak sebatas persoalan medis semata, tetapi sudah menjadi suatu masalah yang menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Kedua, masyarakat, yang menjadi perkumpulan identitas komunal dan menjadi unsur inti institusi negara. Ketiga, kebijakan pemerintah, yang mana berkaitan dengan aturan-aturan yang dicanangkan oleh para pemegang tampuk kekuasaan untuk membuat regulasi yang tepat bagi masyarakat (khususnya terkait Covid-19). Keempat, persepsi masyarakat, atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, di mana sangat menyangkut keadaan hidup mereka yang sangat kontekstual.

Lebih lanjut, apabila dihadapkan dengan penelitian-penelitian serupa yang sudah dilakukan, maka kebaruan penelitian ini terletak pada lokasi yang dipilih, yang mana masih minim dikaji dalam level lokal (Kota Kupang pada umumnya dan masyarakat Oetete pada khususnya). Karena itu, mengenai lokasi penelitian, penulis memutuskan untuk

memfokuskan wilayah penelitian pada masyarakat RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penelitian ini dan menjadi lebih spesifik dan mendetail. Karena itu, penelitian ini berupaya untuk melihat permasalahan ini secara lebih detail. RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang terdiri dari 80 Kepala Keluarga (KK) dan 400 Jiwa.

Berdasarkan penalaran singkat di atas, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan COVID-19” (Studi Kasus Para Pedagang RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang.)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan COVID-19 (Studi Kasus Para Pedagang RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan COVID-19 (Studi Kasus Para Pedagang RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdapat dua manfaat yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi penelitian untuk mendalami pengetahuan tentang komunikasi dan pengalaman bagi penulis dalam menganalisis Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan COVID-19” (Studi Kasus Masyarakat RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Bagi mahasiswa, untuk memberikan masukan serta wawasan kepada masyarakat tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan COVID-19” (Studi Kasus Masyarakat RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- b) Bagi almamater, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Fakultas Ilmu komunikasi dan Ilmu Politik secara khusus bagi program studi ilmu komunikasi.
- c) Bagi penulis, sebagai bagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi dan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- d) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dengan menjaga diri dan mampu menangani kasus covid-19 yang semakin merebak di Kota Kupang.

1.5 Kerangka Berpikir Asumsi dan Hipotesis

Bagian ini menjelaskan tentang pegangan-pegangan penulis sebelum melakukan penelitian. Pegangan-pegangan ini terdiri atas tiga bagian : kerangka pemikiran, asumsi dan hipotesis.

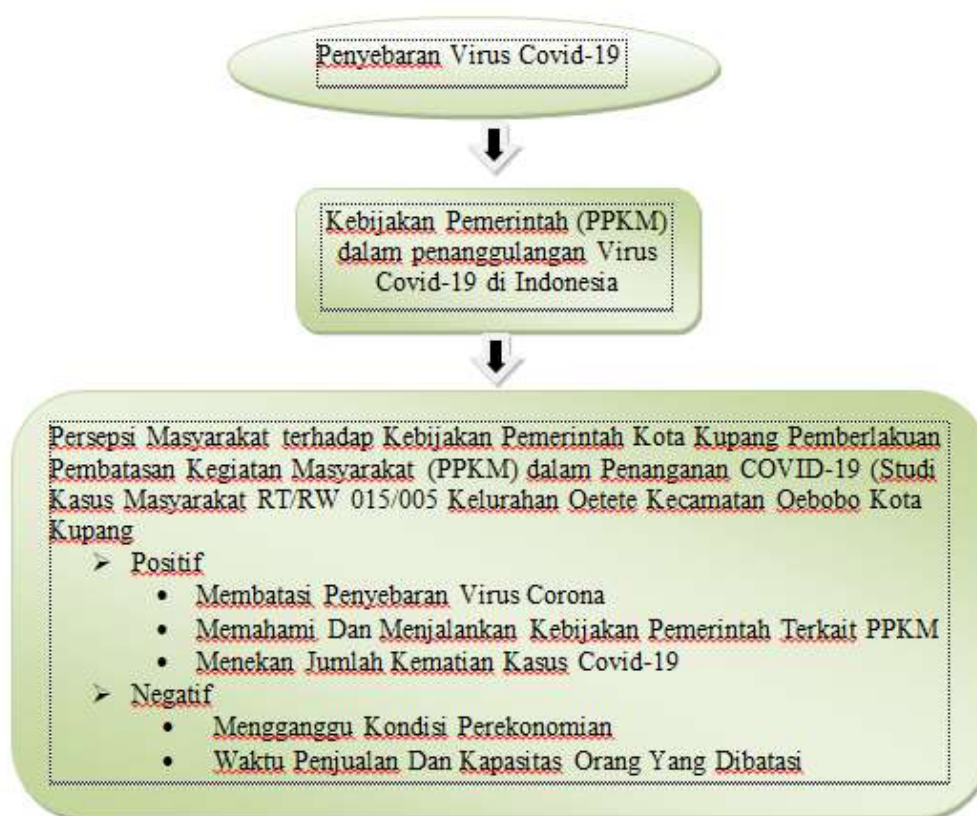
1.5.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini adalah penalaran yang akan peneliti kembangkan dalam memecahkan suatu masalah. Ringkasnya, kerangka pikir menggambarkan jalan pikiran dan pelaksanaan penelitian yang berfokus pada Persepsi para pedagang di RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Menangani Virus Covid-19 (kajian penulis: 2021)

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dirunut sebagai berikut: Pertama, merumuskan permasalahan terkait Covid-19, di mana penelitian ini akan mencoba menelusuri persebaran Covid dalam lanskap global, nasional, dan lokal di Kota Kupang, khususnya lokasi penelitian peneliti. Kedua, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menarasikan keadaan masyarakat yang hendak dilihat persepsinya, di mana terdiri dari para pedagang di Oetete sebagai pihak yang terkena imbas dari kebijakan pemerintah. Ketiga, peneliti akan menelisik kebijakan-kebijakan yang disodorkan kepada masyarakat khususnya para pedagang Oetete dan bagaimana akibat-akibat realnya. Keempat, mencari informasi tentang persepsi masyarakat (pedagang Oetete) yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait Covid-19, dan akan mencoba menganalisis dan menginterpretasikannya untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan terkait penelitian ini.

Dengan demikian untuk memperjelaskan dapat dilihat pada kerangka pemikiran peneliti yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Berpikir



1.5.2 Asumsi

Asumsi merupakan anggaran dasar yang ditetapkan peneliti yang arannya sudah diterima secara umum (Jusuf Soewandi, 2012 :9394). Asumsi yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah Para Pedagang RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Menangani Virus Covid-19.

1.5.3 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang sifatnya sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti kebenarannya melalui data yang terkumpul. Dengan kata lain suatu pendapat yang digunakan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dari suatu hal yang belum terbukti kebenarannya (Amiruddin, 2016 :69).

Hipotesis yang dapat peneliti rumuskan pada penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat khususnya Para Pedagang terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan COVID-19 (Studi Kasus Masyarakat RT/RW 015/005 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang) secara positif Membatasi Penyebaran Virus Corona, Memahami dan Menjalankan Kebijakan Pemerintah Terkait PPKM, Menekan Jumlah Kematian Kasus Covid-19, dan dampak negatif Mengganggu Kondisi Perekonomian dan Waktu Penjualan Dan Kapasitas Orang Yang Dibatasi.